

ABSTRAK

Pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang krusial di Kabupaten Purworejo. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta dominasi sektor informal menjadi faktor utama penyebabnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum diiringi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai. Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo berperan strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam mengatasi pengangguran terbuka serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo telah melaksanakan berbagai upaya dalam menekan angka pengangguran terbuka, antara lain melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi, penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, maupun faktor eksternal seperti ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lowongan pekerjaan, menurunnya aktivitas dunia usaha, rendahnya kompetensi tenaga kerja, serta kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dinas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur pelatihan, pembaruan sarana prasarana, optimalisasi anggaran, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dalam menekan angka pengangguran terbuka.

Kata Kunci: Pengangguran Terbuka, Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja.